AL ITIHADU JURNAL PENDIDIKAN
E-ISSN: 2962-9497 | Vol. 5 No. 1 2026 | page. 23-34
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/alittihadu

RELASI KEKUASAAN DALAM KOMUNIKASI PENDIDIKAN: PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Saipul Siagian[1] Muhd. Hayyanul Damanik[2]

[1]Universitas Insaniah Sumatera Utara[2]STAI Al-Hikmah Tebing Tinggi
saipulsiagian@unisu.ac.id , hayyanuldmk@al-hikmah.ac.id

Abstrak. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi kekuasaan dalam komunikasi pendidikan melalui perspektif sosiologi pendidikan dengan berfokus pada otoritas pedagogis, pengendalian wacana, disiplin kelembagaan, dan respons peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data mencakup karya teoretis Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Antonio Gramsci, dan Jürgen Habermas, serta buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan interpretasi kritis. Hasil kajian mengidentifikasi empat dimensi utama relasi kekuasaan dalam komunikasi pendidikan, yaitu otoritas pedagogis dan wacana kurikuler, asimetri komunikasi dan kontrol instruksional, disiplin spasial dan pengawasan kelembagaan, serta tipologi respons peserta didik. Kekuasaan bekerja melalui penentuan pengetahuan yang dianggap sah, ketimpangan hak bicara, penggunaan bahasa evaluatif, penerapan tata tertib, dan praktik pendisiplinan. Respons peserta didik mencakup kepatuhan, resistensi pasif, kritik ekspresif, dan resistensi simbolik. Kajian ini menegaskan bahwa otoritas pendidikan tidak selalu bersifat menindas, tetapi dampaknya bergantung pada cara kewenangan dijalankan dan ruang partisipasi yang tersedia bagi peserta didik. Oleh karena itu, komunikasi pendidikan perlu dikembangkan secara lebih dialogis, partisipatif, reflektif, dan demokratis untuk mendukung keadilan serta perkembangan nalar kritis peserta didik.

Kata Kunci: Relasi Kekuasaan, Komunikasi Pendidikan, Sosiologi Pendidikan, Otoritas Pedagogis, Resistensi Peserta Didik.

Abstract. *This article examines power relations in educational communication from the perspective of educational sociology, focusing on pedagogical authority, discourse control, institutional discipline, and student responses. This study employs a qualitative approach through library research, drawing on the theoretical works of Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Antonio Gramsci, and Jürgen Habermas, as well as relevant academic books and scientific journal articles. Data were collected through literature documentation and analyzed using content analysis, involving data reduction, data presentation, and critical interpretation. The findings identify four interrelated dimensions of power in educational communication: pedagogical authority and curricular discourse, communicative asymmetry and instructional control, spatial discipline and institutional surveillance, and typologies of student responses. The analysis indicates that power operates through the determination of legitimate knowledge, unequal distribution of speaking rights, evaluative language, institutional regulations, and disciplinary practices. Student responses range from compliance and passive resistance to expressive criticism and symbolic resistance. These findings suggest that educational authority is not inherently oppressive; its implications depend on how authority is exercised and whether students are given meaningful opportunities to participate. The article argues that more democratic educational communication requires critical reflection, equitable participation, contextual learning, and dialogue oriented toward mutual understanding*.

Keywords: *Power Relations, Educational Communication, Educational Sociology, Pedagogical Authority, Student Resistance*.

Corresponding Author: Saipul Siagian				
Article History	Submitted: Januari 24, 2026	Revision: Maret 04, 2026	Accepted: Mei 09, 2026	Published: July 30, 2026
DOI: https://doi.org/10.63736/ai.v4i2				

Pendahuluan

Komunikasi merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan karena proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan pembentukan nilai, identitas, perilaku, dan pola hubungan sosial. Melalui komunikasi, guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, serta pimpinan dan tenaga pendidik membangun pemahaman mengenai pengetahuan, kedisiplinan, kewenangan, dan tanggung jawab. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, komunikasi dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berlangsung dalam struktur kelembagaan tertentu dan dipengaruhi oleh perbedaan kedudukan, otoritas, serta akses terhadap sumber daya (Cornelissen et al., 2015). Oleh karena itu, proses komunikasi pendidikan tidak selalu berlangsung dalam hubungan yang setara. Pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan materi pembelajaran, menetapkan aturan, memberikan penilaian, dan mengatur perilaku peserta didik mempunyai posisi yang relatif lebih kuat dalam menentukan arah interaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pendidikan perlu dikaji bukan hanya berdasarkan efektivitas penyampaian pesan, melainkan juga berdasarkan distribusi kekuasaan yang memengaruhi siapa yang berhak berbicara, pengetahuan apa yang dianggap sah, dan bagaimana peserta didik merespons otoritas pendidikan.

Relasi kekuasaan dalam komunikasi pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari otoritas pedagogis yang diperlukan untuk mengatur pembelajaran hingga dominasi yang membatasi partisipasi dan kebebasan berpikir peserta didik. Dalam hubungan guru siswa dan dosen mahasiswa, misalnya, kekuasaan dapat diwujudkan melalui penentuan aturan diskusi, pemberian nilai, penggunaan bahasa evaluatif, serta penerimaan atau penolakan terhadap pendapat tertentu.

Pada hubungan kepala sekolah guru dan institusi peserta didik, kekuasaan juga bekerja melalui kebijakan akademik, tata tertib, kurikulum, mekanisme evaluasi, dan prosedur administratif. Praktik tersebut tidak serta-merta bersifat negatif karena otoritas dapat diperlukan untuk menjaga keteraturan dan mencapai tujuan pendidikan. Persoalan muncul ketika kewenangan digunakan secara sewenang-wenang, menghasilkan dominasi, membungkam kritik, atau menempatkan perspektif kelompok tertentu sebagai satu-satunya kebenaran yang dapat diterima. Kekuasaan juga dapat

beroperasi melalui hegemoni, kekerasan simbolik, dan kontrol wacana, yaitu ketika nilai, bahasa, dan standar tertentu diterima sebagai sesuatu yang alamiah tanpa dipertanyakan asal-usul maupun kepentingan sosial yang menyertainya (Briggs, 2022). Dalam pembelajaran digital, persoalan ini dapat meluas melalui pengaturan akses, moderasi diskusi, desain platform, dan penggunaan sistem penilaian yang memengaruhi partisipasi peserta didik.

Secara teoretis, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui pemikiran Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Antonio Gramsci, dan Jürgen Habermas. Foucault (Bourdieu, 1977) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak semata-mata bekerja melalui larangan atau pemaksaan, tetapi juga melalui pengawasan, normalisasi, dan produksi pengetahuan yang membentuk perilaku individu. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana aturan sekolah, mekanisme disiplin, dan penilaian akademik menghasilkan kategori mengenai siswa yang dianggap patuh, berprestasi, atau menyimpang. Sementara itu, Bourdieu dan Passeron (Bourdieu, 1977) menunjukkan bahwa pendidikan dapat mereproduksi ketimpangan sosial melalui legitimasi budaya dominan.

Konsep kekerasan simbolik, habitus, dan modal kultural relevan untuk memahami mengapa gaya bahasa, kebiasaan berkomunikasi, dan pengetahuan yang dekat dengan kelompok sosial tertentu dapat lebih mudah diakui sebagai standar keberhasilan akademik. Paulo (Paulo Reglus Neves Freire, 1970), melalui kritik terhadap model pendidikan gaya bank, menyoroti praktik pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai penerima pasif pengetahuan dan mengabaikan kapasitas kritis mereka.

Sebagai alternatif, pendidikan hadap-masalah menekankan dialog dan pembacaan kritis terhadap realitas. Adapun Gramsci (Antonio Francesco Gramsci, 1971) memberikan landasan untuk memahami hegemoni, yakni pembentukan penerimaan terhadap nilai dan pandangan dominan melalui proses sosial dan kultural. Habermas (Friedrich Ernst Jürgen Habermas, 1984) melengkapi perspektif tersebut melalui teori tindakan komunikatif yang menempatkan pencapaian pemahaman bersama sebagai orientasi komunikasi, berbeda dari tindakan strategis yang diarahkan terutama untuk memengaruhi atau mengendalikan pihak lain.

Kajian mengenai relasi kekuasaan dalam komunikasi pendidikan perlu mempertemukan perspektif-perspektif tersebut karena masing-masing menjelaskan dimensi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Foucault (Bourdieu, 1977) membantu mengidentifikasi mekanisme disiplin dan produksi pengetahuan, Bourdieu menjelaskan reproduksi dominasi melalui legitimasi budaya (Bourdieu, 1977), Freire menekankan pembebasan melalui dialog kritis, Gramsci (Antonio Francesco Gramsci, 1971) menerangkan pembentukan persetujuan terhadap tatanan dominan, sedangkan Habermas (Friedrich Ernst Jürgen Habermas, 1984) menyediakan kerangka normatif untuk menilai kualitas komunikasi yang berorientasi pada pemahaman bersama. Penelitian terdahulu dalam bidang sosiologi pendidikan dan pedagogi kritis secara konseptual dapat dikelompokkan ke dalam kajian tentang reproduksi ketimpangan, otoritas guru, disiplin kelembagaan, pendidikan dialogis, dan partisipasi peserta didik. Namun, kecenderungan dan temuan empiris spesifik dari penelitian-penelitian tersebut perlu ditetapkan melalui penelusuran literatur yang sistematis sebelum dapat dinyatakan sebagai hasil kajian terdahulu. Celah penelitian yang hendak ditelaah dalam artikel ini terletak pada kebutuhan untuk menyintesiskan kelima perspektif teoretis tersebut ke dalam satu kerangka analisis komunikasi pendidikan, sehingga kekuasaan dapat dipahami sekaligus sebagai mekanisme pengaturan, reproduksi ketimpangan, pembentukan kesadaran, dan kemungkinan pembebasan.

Kajian ini penting dilakukan karena praktik komunikasi pendidikan di Indonesia berlangsung dalam lingkungan sosial yang beragam, dengan perbedaan latar belakang ekonomi, budaya, bahasa, pengalaman pendidikan, dan akses terhadap teknologi. Kurikulum, kebijakan penilaian, budaya senioritas, hierarki kelembagaan, serta kebiasaan komunikasi yang menekankan kepatuhan berpotensi memengaruhi kesempatan peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan mempertanyakan keputusan akademik (Kiram, 2026). Dalam konteks tertentu, penghormatan terhadap guru dan pimpinan dapat mendukung etika serta keteraturan pendidikan, tetapi dapat pula disalahartikan sebagai kewajiban untuk menerima seluruh keputusan tanpa ruang dialog. Tantangan serupa muncul dalam pembelajaran digital ketika interaksi berlangsung melalui platform yang memiliki aturan, fitur, dan mekanisme pengawasan

tersendiri. Secara teoretis, analisis relasi kekuasaan dapat memperkaya sosiologi pendidikan dengan menghubungkan struktur sosial, praktik bahasa, dan dinamika interaksi sehari-hari. Secara praktis, analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan komunikasi pedagogis yang lebih reflektif, partisipatif, adil, dan menghargai martabat peserta didik. Meski demikian, kritik terhadap dominasi tidak berarti menghapus seluruh bentuk otoritas pendidikan; persoalan utamanya adalah bagaimana kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, terbuka terhadap evaluasi, dan tidak menghambat perkembangan nalar kritis.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis relasi kekuasaan dalam komunikasi pendidikan melalui perspektif sosiologi pendidikan dengan menelaah konsep kuasa/pengetahuan, kekerasan simbolik, habitus, pendidikan dialogis, hegemoni, dan tindakan komunikatif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), dengan sumber utama berupa karya teoretis para pemikir yang relevan serta sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan komunikasi pendidikan dan relasi kekuasaan. Literatur dianalisis secara kritis dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta keterkaitan antarkerangka teori. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan menghasilkan sintesis konseptual yang menjelaskan cara kekuasaan bekerja dalam praktik komunikasi pendidikan, implikasinya terhadap relasi pendidik dan peserta didik, serta kemungkinan pengembangan komunikasi pendidikan yang lebih dialogis dan demokratis dalam konteks Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena relasi kekuasaan dalam komunikasi pendidikan merupakan persoalan konseptual dan teoretis yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap pemikiran para ahli serta keterkaitan antarteori sosial. Melalui studi kepustakaan, fenomena tersebut dapat

dianalisis berdasarkan perspektif sosiologi pendidikan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Proses penelitian diarahkan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai bagaimana kekuasaan bekerja melalui praktik komunikasi, produksi penget dominasi simbolik, dan interaksi dalam institusi pendidikan (Adlini et al., 2022).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya teoretis Michel Foucault mengenai relasi kuasa dan pengetahuan, Pierre Bourdieu mengenai kekerasan simbolik dan reproduksi sosial, Paulo Freire mengenai pendidikan dialogis, Antonio Gramsci mengenai hegemoni, serta Jürgen Habermas mengenai tindakan komunikatif. Sumber sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan fokus kajian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah, kredibilitas penerbit atau jurnal, serta kontribusinya terhadap pengembangan analisis. Penggunaan sumber primer dan sekunder dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoretis yang memadai sekaligus memperluas konteks pembahasan melalui hasil penelitian dan dokumen pendukung (Nurliana Harahap, 2014).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan melakukan penelusuran pustaka secara sistematis. Penelusuran diawali dengan penentuan kata kunci, meliputi relasi kekuasaan, komunikasi pendidikan, sosiologi pendidikan, hegemoni, dan kekerasan simbolik. Selanjutnya, sumber ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, serta portal jurnal ilmiah yang relevan. Literatur yang ditemukan diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kejelasan identitas bibliografis, kredibilitas sumber, dan kemutakhiran publikasi, dengan tetap mempertahankan karya klasik yang menjadi landasan teori. Informasi yang relevan kemudian dicatat dan dikelompokkan berdasarkan konsep utama, perspektif teoretis, temuan penelitian terdahulu, serta keterkaitannya dengan fokus kajian. Prosedur ini dilakukan untuk menjaga keteraturan dokumentasi dan memudahkan proses interpretasi terhadap sumber yang telah dikumpulkan (Purwoko., 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang tidak relevan disisihkan, sedangkan konsep dan argumentasi yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam komunikasi pendidikan dipilih serta dikategorikan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta hubungan antarperspektif teoretis. Selanjutnya, kesimpulan ditarik melalui interpretasi kritis terhadap pola dan makna yang ditemukan dalam literatur. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai karya dan jenis publikasi, serta pembacaan berulang untuk memastikan konsistensi interpretasi. Langkah tersebut dilakukan agar hasil analisis memiliki dasar argumentasi yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademis (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Otoritas Pedagogis dan Monopoli Wacana Kurikuler

Pendidik sebagai penentu pengetahuan yang sah. Sejumlah studi menempatkan pendidik sebagai pusat penentuan metode dan kebenaran pengetahuan di kelas. Penelitian pada guru agama Islam di sekolah umum di Depok menunjukkan bahwa kuasa guru berkaitan erat dengan wacana, pengetahuan, dan kebenaran. Kuasa itu dijalankan melalui kegiatan rutin keagamaan, tugas sekolah, dan peraturan (Faiz Muhammad Ilham, 2021). Pola serupa dilaporkan pada program full day school di sebuah sekolah dasar. Pembelajaran berpusat pada guru, dan guru menetapkan aturan yang harus dipatuhi sehingga mendisiplinkan sekaligus menyeragamkan cara berpikir siswa. Pada pembelajaran kitab kuning di pesantren, komunikasi berlangsung satu arah dengan ustaz sebagai komunikator yang dominan (Nur Cholis, 2018).

Dominasi ini tidak hilang pada kurikulum yang mengusung kemerdekaan belajar. Kajian wacana di kelas X SMAN 9 Gowa pada implementasi Kurikulum Merdeka menyimpulkan bahwa guru masih memegang otoritas dominan dan siswa cenderung menerimanya sebagai bentuk pendisiplinan (Hasanah, Uswatun, Jufri, 2025).

Kurikulum sebagai wacana resmi institusi. Pada tingkat kelembagaan, literatur memperlihatkan kontestasi atas siapa yang menentukan isi kurikulum. Kajian tentang kurikulum pesantren menelaah upaya negara memengaruhi kurikulum melalui intervensi persuasif, serta munculnya hegemoni tandingan dari pihak pesantren (Hefni, 2011). Kajian konseptual juga menelaah dominasi kekuasaan dalam pendidikan sebagai sesuatu yang bekerja lewat institusi sekolah (Martono, 2014). Tinjauan pustaka terhadap karya-karya utama pemikiran disiplin dan normalisasi menyimpulkan bahwa praktik pendidikan berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang membentuk kesadaran, perilaku, dan identitas peserta didik melalui pengawasan, evaluasi, dan penanaman norma (Dewi Sulistyowati, 2026).

2. Asimetri Komunikasi dan Kontrol Instruksional

Distribusi hak bicara. Literatur interaksi kelas lazim memotret struktur tiga langkah: guru memulai (initiation), siswa merespons (response), dan guru mengevaluasi atau menindaklanjuti (feedback) (Sinclair, John McHardy, 1975). Studi di Indonesia pada kelas bahasa Inggris menemukan inisiasi sebagai pola paling dominan (Arba Ina Putri, Machdalena Vianty, 2021). Studi lain di sebuah SMA di Padang Panjang menunjukkan bahwa inisiasi guru dan respons siswa saling mendominasi, sedangkan frekuensi inisiasi oleh siswa sangat rendah [Rahmi, 2018]. Perlu dicatat bahwa sebagian besar studi jenis ini berasal dari kelas bahasa Inggris, sehingga generalisasinya terbatas. Kontrol atas interaksi. Studi di sebuah sekolah dasar di Lamongan mendokumentasikan sanksi atas gangguan interaksi, misalnya siswa yang mengganggu guru saat menerangkan materi diminta menulis permohonan maaf sebanyak empat halaman (Faridah, 2017).

Bahasa evaluatif dan bahasa pengendali. Studi yang sama mengidentifikasi empat bentuk tuturan pengendali dari guru: peringatan, perintah, ancaman, dan hinaan. Di antara siswa, studi itu juga menemukan pelabelan (Faridah, 2017). Pada Kurikulum Merdeka, kajian wacana mendeskripsikan 18 bentuk eufemisasi (misalnya permintaan, keharusan, kewajiban, kedisiplinan) dan 9 bentuk sensorisasi (misalnya pemarjinalan, ancaman, paksaan, larangan) dalam komunikasi guru siswa. Artinya, kontrol tidak hanya hadir lewat bahasa yang keras, tetapi juga lewat bahasa yang dibingkai halus. Tata tertib dan prosedur. Aturan tata tertib menjadi saluran utama kontrol komunikasi. Di sekolah

dasar yang diteliti, tata tertib tentang seragam dan atribut menjadi dasar tegurannya, misalnya pada upacara Senin. Di SMK di Sidoarjo, tata tertib sekolah juga menjadi titik pertemuan antara pendisiplinan guru dan perlawanan siswa (Tri Emalia, A., & Pribadi, 2019).

3. Disiplin Spasial dan Pengawasan Kelembagaan

Pengaturan ruang, waktu, dan perilaku. Literatur yang berhasil dihimpun lebih banyak menggambarkan pengaturan perilaku di ruang sekolah daripada tata letak fisik kelas itu sendiri. Studi di Lamongan, misalnya, mencatat teguran, bahkan kekerasan fisik, bagi siswa yang berada di kelas ketika pelajaran olahraga berlangsung. Penelitian di Depok menunjukkan bahwa guru berperan sebagai pengawas dan bahwa disiplin dijalankan lewat pengawasan serta hukuman. Kegiatan rutin keagamaan, tugas, dan peraturan menjadi perangkat pengaturan keseharian Karakter pengawasan. Studi etnografis di sekolah dasar menemukan bahwa pengawasan bersifat terputus-putus dan bukan total, bekerja melalui pendengaran sama seperti penglihatan, sehingga terbuka bagi perlawanan dan penghindaran (Gallagher, 2010). Pengawasan digital. Kajian konseptual menelaah relevansi teknologi disipliner bagi sekolah pada era nalar digital. Kajian empiris di Tiongkok pada masa pandemi COVID-19 meneliti kontrol dan resistensi siswa perdesaan dalam kelas daring (Chen, 2023). Temuan tentang pengawasan digital dalam konteks Indonesia masih terbatas dalam korpus ini.

4. Tipologi Respons Peserta Didik

Respons peserta didik dalam literatur tidak tunggal, Kepatuhan dan penerimaan. Studi di sekolah dasar menempatkan siswa sebagai pihak yang mematuhi tata tertib. Kajian pada Kurikulum Merdeka melaporkan kecenderungan siswa menerima otoritas guru. Resistensi pasif dan simbolik. Penelitian di SMA Al Azhar Gresik menemukan tiga bentuk resistensi: pasif (absen secara mental, diam, bermain ponsel), ekspresif (kritik verbal terhadap materi atau metode), dan simbolik (tidak atau asal mengerjakan tugas). Penulisnya menafsirkannya sebagai respons terhadap materi dan metode yang dirasa kurang relevan (Indah, 2025). Di SMKN 1 Surabaya, kebijakan full day school ditanggapi dengan membolos, keterlambatan yang disengaja, keluar kelas sebelum jam berakhir,

dan unggahan media sosial tentang kebosanan. Siswa melakukannya secara sadar meskipun berisiko (Agung, 2019).

Resistensi terbuka. Di SMK Sidoarjo, resistensi terbuka berupa protes kepada guru, membantah, dan tidur di kelas. Resistensi tertutup justru lebih banyak, seperti membolos, menindik, merokok, memberi julukan pada guru, dan mencoret di kamar mandi. Resistensi pada tingkat kelembagaan. Pada institusi pendidikan usia dini di Yogyakarta, resistensi dipicu oleh keengganan pengurus mengakomodasi demokratisasi dan transparansi. Resistensi itu dimotori komite sekolah dan juga melibatkan guru serta pengurus yang mengundurkan diri. Temuan ini berada pada tingkat pemangku kepentingan, bukan peserta didik, tetapi menunjukkan bahwa dominasi memicu perlawanan dari berbagai pihak.

Komunikasi dialogis. Dalam korpus ini, respons dialogis lebih banyak muncul sebagai tawaran normatif daripada temuan empiris. Pendidikan hadap-masalah dan dialog diajukan sebagai alternatif atas pola pendidikan satu arah. Kajian atas komunikasi monologis di pesantren juga mengajukan komunikasi dialogis sebagai alternatif. Studi resistensi siswa merekomendasikan pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan reflektif.

Simpulan

Relasi kekuasaan dalam komunikasi pendidikan merupakan fenomena sosial yang bekerja melalui otoritas pedagogis, pengendalian wacana kurikuler, ketimpangan hak bicara, disiplin kelembagaan, dan pengawasan terhadap perilaku peserta didik. Sintesis perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Antonio Gramsci, dan Jürgen Habermas menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi mengatur proses pembelajaran, tetapi juga dapat mereproduksi ketimpangan, membentuk kepatuhan, serta memengaruhi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis. Respons peserta didik terhadap kekuasaan beragam, mulai dari kepatuhan hingga resistensi pasif, ekspresif, dan simbolik. Meskipun demikian, otoritas pendidikan tetap diperlukan untuk menjaga keteraturan dan mencapai tujuan pembelajaran. Persoalan mendasarnya terletak pada bagaimana kewenangan digunakan,

dipertanggungjawabkan, dan dibuka terhadap evaluasi. Oleh karena itu, komunikasi pendidikan perlu diarahkan pada praktik yang dialogis, partisipatif, reflektif, dan demokratis, dengan memberikan ruang yang adil bagi peserta didik untuk menyampaikan pendapat, mempertanyakan gagasan, dan terlibat dalam pembentukan pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transmisi pengetahuan dan pendisiplinan, tetapi juga ruang pengembangan kesadaran kritis, kesetaraan, dan pemahaman Bersama.

Daftar Pustaka

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Agung Bowo Wibowo, M. A. L. (2019). Resistensi siswa SMK Negeri 1 Surabaya terhadap kebijakan full day school. *Paradigma*, *7*(1).

Antonio Francesco Gramsci. (1971). *Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds. & Trans.)*. International Publishers.

Bourdieu, P. F. (1977). *Reproduction in education, society and culture (R. Nice, Trans.)*. Sage Publications.

Briggs, C. L. (2022). Linguistic ideologies And the naturalization of power in warao discourse. *Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA)*, 387–404. https://doi.org/10.1075/prag.2.3.14bri

Chen, K. X. dan J. (2023). Disciplining the online class: Control and resistance of rural students in China during the COVID-19 pandemic. *Power and Education*, *16*(2), 166–181.

Cornelissen, J. P., Durand, R., Fiss, P. C., Lammers, J. C., & Vaara, E. (2015). Putting Communication Front and Center in Institutional Theory and Analysis. *Academy of Management Review*, *40*(1), 10–27. https://doi.org/10.5465/amr.2014.0381

Dewi Sulistyowati, A. S. (2026). Analisis konsep disiplin, kekuasaan dan normalisasi sosial dalam pendidikan melalui pendekatan teori Michel Foucault. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, *12*(1).

Faiz Muhammad Ilham. (2021). Relasi kuasa guru dalam pengajaran pendidikan agama Islam. *Paradigma*, *9*(2).

Friedrich Ernst Jürgen Habermas. (1984). *The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society (T. McCarthy, Trans.)*. Beacon Press.

Gallagher, L. (2010). Are schools panoptic? Surveillance & Society. *7*, *3*(4), 262–272.

Hasanah, Uswatun, Jufri, M. S. (2025). Representasi kekuasaan simbolik dalam pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka kelas X (kajian wacana kritis Pierre Bourdieu). *Ideguru*, *10*(2).

Hefni, M. (2011). Runtuhnya hegemoni negara dalam menentukan kurikulum pesantren. *Karsa*, *19*(1).

Indah, P. D. P. (2025). Resistensi siswa dalam pembelajaran sosiologi di SMA: Studi

tentang agensi dan makna belajar. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, *5*(2), 506–518.

Kiram, M. S. (2026). Academic Compliance Culture and Its Implications on Genuine Learning Among Filipino Tertiary Students. *Journal of Education and Academic Settings*, *3*(1), 1–15. https://doi.org/10.62596/6hshk189

Martono, N. (2014). Dominasi kekuasaan dalam pendidikan: Tesis Bourdieu dan Foucault tentang pendidikan. *Jurnal Interaksi*, *8*(1).

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.

Nur Cholis. (2018). Model komunikasi pengajaran monologis dalam pembelajaran kitab kuning (kritik banking pedagogy Paulo Freire). In *Skripsi, Universitas Yudharta Pasuruan*. Universitas Yudharta Pasuruan.

Nurliana Harahap. (2014). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, *8*(1), 68–73.

Paulo Reglus Neves Freire. (1970). *Pedagogy of the oppressed (M. B. Ramos, Trans.)*. Herder and Herder.

Purwoko., A. M. B. (2018). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling expressive writing. *Jurnal BK UNESA*, *1*(1), 1–8.